

# RENCANA KERJA

## **DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019**



Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp/Fax. (0266) 245996/7

SUKABUMI

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbilalamin, segala puji-pujian dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 telah tersusun.

Sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang semula Dinas Sosial melaksanakan dua urusan wajib maka setelah ditetapkannya Perbup No 53 Tahun 2016 Dinas Sosial hanya melaksanakan satu urusan wajib yaitu urusan sosial. Rencana kerja merupakan arah dan kebijakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam RENJA ini juga kita menyajikan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan prioritas pembangunan daerah. RENJA Dinas Sosial ini memuat aspek perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan dan hasil evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya, juga menyajikan gambaran umum serta Kondisi Pembangunan Bidang Urusan Sosial yang akan dilaksanakan Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja ini. Semoga Renja ini dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan. Kiranya Tuhan memberikan hikmah dan anugerah-Nya bagi kita semua. Amin.

Sukabumi, Juli 2018  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukabumi



Drs. IWAN RIDWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580705 198103 1 018

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Gambar dan Tabel</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	11
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	18
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	19
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi .....	21
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi .....	21
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	25
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	26
5.1. Simpulan .....	26
5.2. Saran .....	27

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

		Hal
- Tabel 2.1	Target dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2016-2021	6
- Tabel 2.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015	17
- Tabel TC. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019	Lampiran
- Tabel TC. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	Lampiran
Tabel TC. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	Lampiran
Tabel TC. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019	Lampiran
Tabel TC. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	Lampiran
Tabel 4.1	Daftar Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	Lampiran
- Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

ditempuh mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dokumen Renja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang mengacu kepada hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Nomor 6178);

14. Peraturan daerah kabupaten Sukabumi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
16. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bahwa Dinas Sosial;
17. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
18. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan teknis tahunan yang memuat kebijakan, program-program, sasaran-sasaran yang akan dicapai serta indikasi kegiatan pembangunan dalam Tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah agar pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 dapat terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien, yaitu:

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) Menjalinkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d) Menjalinkan tercapainya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



#### 1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian dokumen Renja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan tambahan materi uraian kebutuhan yang mendukung penyajian dokumen Renja SKPD dengan uraian sebagai berikut :

**Bab I : PENDAHULUAN**, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

**Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

**Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, yang memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Bab V : Penutup.**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 4.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Dinas Sosial memiliki target kinerja untuk pembantuan urusan sosial selama 5 tahun yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial. Indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Target dan Indikator Kinerja Dinas Sosial**  
**Tahun 2016-2021**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun Transisi/ Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;	337 Orang	290 Orang	334 Orang	384 Orang	441 Orang	507 Orang	583 Orang	2.539 Orang
2	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial ;	411 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang
3	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP;	187 Orang	200 Orang	220 Orang	242 Orang	266 Orang	293 Orang	322 Orang	1.543 Orang
4	Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;	120 Orang	120 Orang	125 Orang	135 Orang	135 Orang	140 Orang	145 Orang	795 Orang
5	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS ;	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang
6	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat M8iskin (Keluarga,	34.268 Orang	33.716 Orang	35.325 Orang	36.932 Orang	38.539 Orang	40.146 Orang	41.754 Orang	226.414 Orang

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun Transisi/ Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat dan Korban Bencana;								
7	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TSKS dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	344 Orang	399 Orang	414 Orang	424 Orang	429 Orang	434 Orang	439 Orang	2.539 Orang
8	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	18 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	60 Lembaga

Dalam rangka mencapai tujuan telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Sosial melaksanakan Urusan Wajib Layanan Dasar Sosial. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. **Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS).**
  - a) Monitoring dan Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH).
  - b) Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Adat.
  - c) Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Fakir Miskin.
  - d) Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
  - e) Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Anak Jalanan.
  - f) Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Remaja Putus Sekolah (RPS).

- g) Pelayanan Keluarga Pasien Keluarga Miskin (Gakin) dan Orang Terlantar di Perjalanan.
- h) Pelestarian Nilai Nilai Keperintisan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
- i) Pelayanan Penyuluhan Sosial.

**2. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

- a) Bimbingan Sosial Bagi Anak Korban Narkotika.
- b) Pelayanan Sosial bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA.
- c) Bimbingan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat.
- d) Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Priduktif (UEP) Bagi Penyandang Cacat
- e) MTQ Penyandang Cacat Netra.
- f) Pembinaan Wanita Tuna Susila (WTS)
- g) Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Tuna Sosial
- h) Pengadaan Alat Bantu Fisik Paca.

**3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- a) Sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Sukabumi;
- b) Updatting Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c) Pembinaan Lanjut Usia Terlantar;
- d) Penanganan Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana;
- e) Program Keluarga Harapan (PKH).

**4. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

- a) Desiminasi Program Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukabumi.
- b) Bimbingan Sosial Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
- c) Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- d) Pembinaan Karang Taruna (KT) melalui Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
- e) Pelayanan Pemberian Izin/Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)/Undian Gratis Berhadiah
- f) Pembinaan Lembaga Lanjut Usia (LLI).
- g) Bimbingan Manajemen Orsos/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- h) Pembinaan Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS).
- i) Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan internal yang merupakan kegiatan rutin PD, Dinas Sosial melaksanakan beberapa program di bawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - b. Pelayanan Administrasi kepegawaian.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  - a. Pengadaan Perangkat Komputer;
  - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala AC;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer; dan
  - g. Penataan dan Pengaman Arsip.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja;
  - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan;
  - c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - d. Penyusunan Laporan Keuangan;
  - e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan; dan
  - f. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap capaian target kinerja RENSTRA PD dan RPJMD Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dalam tabel T-C 29 yang disajikan dalam *lampiran*.

## 4.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolak ukur kinerja Dinas Sosial dalam menentukan capaian kinerja berdasarkan perhitungan indikator yang telah ditentukan dalam RENSTRA PD dan RPJMD Kabupaten Sukabumi yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah. Dalam IKU Dinas Sosial memuat 4 (empat) sasaran strategis, diantaranya :

1. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;

Indikator sasaran ini adalah :

- a) Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;
- b) Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

2. Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;

Indikator sasaran ini adalah :

- a) Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP;
- b) Penanganan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;

3. Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam;

Indikator sasaran ini adalah :

- a) Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS.
- b) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana;

4. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Indikator sasaran ini adalah :

- a) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TSKS dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial sampai dengan tahun 2018 dan proyeksi capaian kinerja untuk tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel T-C 30 sebagaimana *terlampir*.

#### **4.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, maka kedudukan Dinas ini adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.3.1. Tugas Pokok**

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

##### **2.3.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- 2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- 3) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; bidang perlindungan dan jaminan sosial; bidang rehabilitasi sosial; bidang pemberdayaan sosial; kelompok jabatan fungsional; dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
- 4) Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- 5) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

### **2.3.3. Susunan Organisasi**

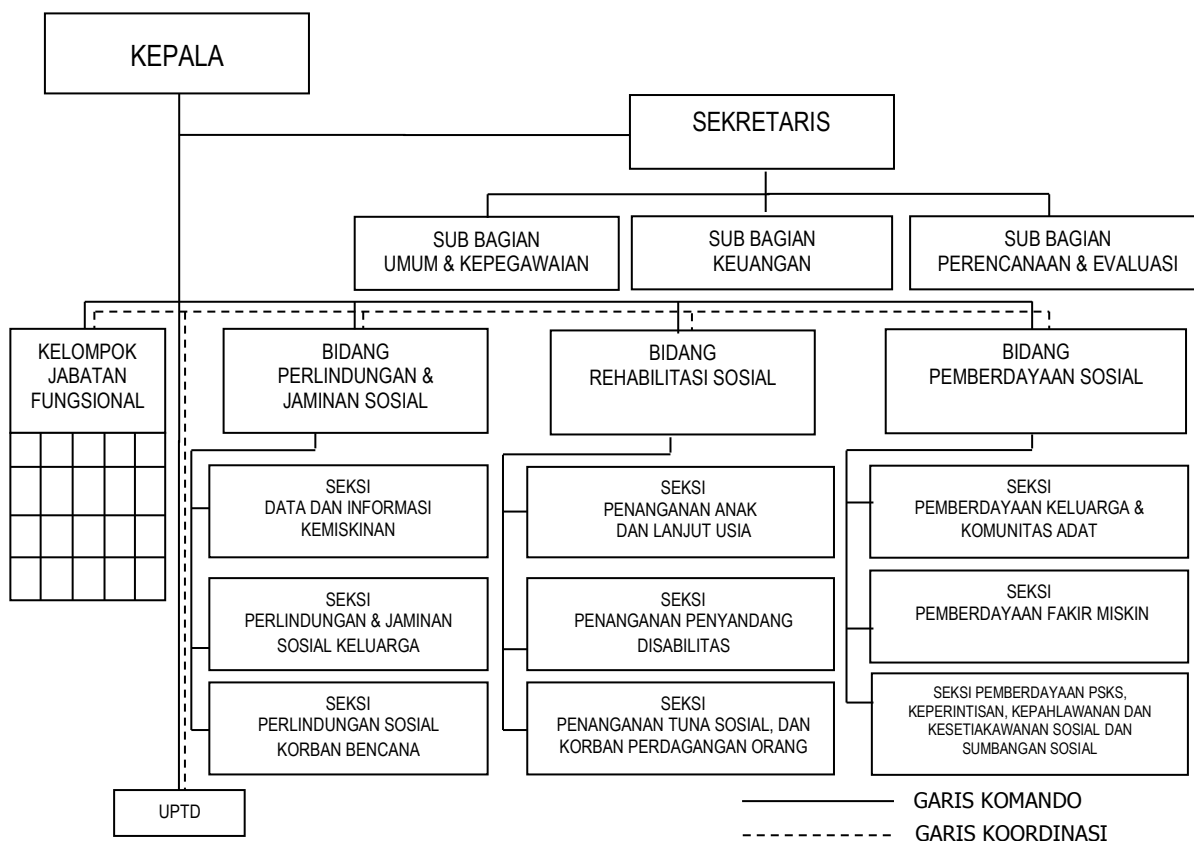
Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahkan:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
  - Seksi Data dan Informasi Kemiskinan;
  - Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
  - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- 4) Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial, membawahkan :
  - Seksi Penanganan Anak dan Lanjut Usia;
  - Seksi Penanganan Penyandang Disabilitas;
  - Seksi Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- 5) Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
  - Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat;
  - Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
  - Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dan Sumbangan Sosial.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan struktur organisasi dapat disajikan dalam gambar di bawah ini :

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**  
(Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016)



Permasalahan yang ditangani oleh Dinas Sosial mencakup 26 jenis permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar dikarenakan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketuna sosialan, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. 26 jenis PMKS tersebut adalah sebagai berikut :

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan

dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Untuk jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Sukabumi dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten**  
**Sukabumi Tahun 2015**

No.	Jenis PMKS	Jumlah (Jiwa)	
1	Anak balita terlantar	11.574	
2	Anak terlantar	48.594	
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	62	
4	Anak jalanan	78	
5, 6 & 7	Anak & Penyandang Kedisabilitas dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	11.802	
8	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	55	
9	Lanjut usia terlantar	14.202	
10	Tuna susila	238	
11	Gelandangan	-	
12	Pengemis	-	
13	Pemulung	36	
14	Kelompok Minoritas	181	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	104	
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	Pusat
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	Pusat
18	Korban trafficking	91	
19	Korban tindak kekerasan	56	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	575	
21	Korban bencana alam	3.198	
22	Korban bencana social	202	
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	7.621	
24	Fakir Miskin	1.296.514	
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	161	
26	Komunitas adat	23.207	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.418.551</b>	

Dari hasil identifikasi permasalahan dapat ditentukan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan yang menjadi prioritas diantaranya :

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani
2. Menurunnya pelestarian dan penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
3. Masih tingginya jumlah Penyandang Disabilitas, TS, ANKN ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani.
4. Masih kurangnya perlindungan dan jaminan sosial.
5. Masih rendahnya pemberdayaan terhadap PSKS

#### **4.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Adapun hasil dari review terhadap rancangan awal RKPD dapat disajikan dalam Tabel T-C. 31, *sebagai mana termuat dalam lampiran.*

#### **4.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dimaksudkan untuk usulan program dan kegiatan yang ditujukan kepada perangkat daerah provinsi, untuk hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi mengusulkan beberapa kegiatan prioritas yang sekiranya tidak mampu untuk dibiayai oleh APBD II. Usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dijsajikan dalam tabel T-C. 32 sebagaimana termuat dalam lampiran.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu: bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil dan program-program pro-rakyat, telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu, melalui sinergi keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.

Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu: (1) penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan dilindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3 kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, integratif dan bertarget spesifik, yaitu: (i) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, serta (iii) mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan.

Sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif integratif dan bertarget spesifik terkait dengan upaya mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dimaksud adalah:

- a. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,0%–7,0% pada tahun 2019;
- b. Diselenggarakannya perlindungan sosial yang komprehensif, yang mencakup: (1) terpenuhinya hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya, dan (2) terbukanya peluang masyarakat miskin untuk berinvestasi pada peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan resiko sepanjang siklus hidup dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi;
- c. Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, yang mencakup identitas hukum, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, layanan listrik serta hunian layak untuk masyarakat miskin dan rentan, termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama meningkatkan ketrampilan kewirausahaan, ketrampilan teknis dalam meningkatkan daya saing dipasar tenaga kerja, dan meningkatkan akses mereka terhadap lembaga finansial.

Arah kebijakan dan strategi nasional yang mengusung agenda pembangunan dan sesuai dengan misi Kementerian Sosial perlu menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi bidang kesejahteraan sosial. Arah kebijakan dan strategi nasional tersebut adalah; (i) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (ii) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, (iii) melakukan revolusi karakter bangsa, serta (iv) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi**

Selaras dengan RPJMD dan Renstra Dinas Sosial, bahwa yang menjadi tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.

#### **3.2.1. Tujuan Renja Dinas Sosial**

Yang menjadi tujuan dari rencana kerja dinas sosial adalah :

- 1) Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
- 2) Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### **3.2.2. Sasaran Renja Dinas Sosial**

Sedangkan yang menjadi sasaran dari rencana kerja dinas sosial adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;
3. Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam;
4. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

### **3.3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dalam hal ini melaksanakan urusan sosial yang memiliki sasaran dan tugas sebagai berikut :

1. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;

3. Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam;
4. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sedangkan langkah strategis yang telah ditetapkan melalui penjabaran misi kepala daerah yang menjadi kebijakan pembangun daerah mengacu pada target dan indikator kinerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius” dengan program kegiatan adalah sebagai berikut :

**a. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS).**

- *Isu Strategis*

Sangat tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus ditangani dan semakin menurunnya pelestarian dan penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

- *Latar Belakang*

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dengan sasaran menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, berdayanya komunitas adat dan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

- *Rasional (Inovasi Kreatif Uraian Singkat Urgensi Program)*

Perlu adanya peningkatan dan fokus penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah maupun swasta terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sehingga akan terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk, veteran serta PKRI.

**b. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

- *Isu Strategis*

1. Masih tingginya Jumlah Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, dan ANKN, ODHA, ABH dan BWBLPyang belum tertangani/terrehabilitasi;

2. Jumlah angka WNI-Migran, Korban perdagangan orang dan Korban Tindak Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi sangat riskan dan membutuhkan perhatian khusus untuk ditindak lanjuti.
- Latar Belakang
    - a) Program ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab serta peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya terutama penyandang disabilitas, tuna sosial dan ANKN/NAPZA, ODHA, ABH dan BWBLP;
    - b) Meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, untuk menghindari perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
    - c) Mendorong optimalnya ruang konsultasi dan pelayanan sosial;
    - d) Terlindunginya hak-hak penyandang disabilitas dan WNI-Migran, Korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan untuk hidup secara wajar dan perhatian yang khusus;
  - Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)  
 Perlu adanya peningkatan dari semua pihak tanpa terkecuali dari pemerintah terhadap penanganan permasalahan sosial terutama penyandang disabilitas, tuna sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP serta WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.

### **c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- Isu Strategis
  1. Tingginya Jumlah keluarga sangat miskin, lanjut usia terlantar dan korban bencana alam yang memerlukan perhatian yang sangat fokus dari berbagai program pemerintah;
  2. Masyarakat miskin membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial demi layaknya kehidupan yang adil, merata dan sejahtera;
  3. Masyarakat miskin, LU Terlantar dan Korban bencana membutuhkan pelayanan dan rujukan yang terpadu sehingga semua program dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat miskin.
- Latar Belakang
  - a) Program ini bertujuan untuk memberikan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dalam program perlindungan

jaminan sosial masyarakat sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial;

- b) Mendorong optimalnya pelayanan program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
  - e) Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat akan hak-hak dalam perlindungan dan jaminan sosial yang ada.
- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)  
Perlindungan dan jaminan sosial akan memberikan layanan dan jaminan bagi masyarakat miskin baik kategori sangat miskin maupun rentan miskin untuk mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial. Masyarakat miskin adalah tanggungjawab bersama dalam memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak tanpa terkecuali.

**d. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

- Isu Strategis  
Masih rendahnya penggalian dan pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menunjang pemberdayaan, rehabilitasi dan jaminan dan perlindungan sosial terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Sukabumi.
- Latar Belakang  
Bertujuan untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan bagi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Dengan adanya PSKS dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di kabupaten Sukabumi akan dapat lebih mudah, terarah dan berkesinambungan sehingga jumlah PMKS yang ada akan semakin menurun.
- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)  
Perlu adanya program kegiatan yang memberdayakan PSKS.

Jumlah program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebanyak 4 program dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 23 kegiatan yang tersebar di seluruh kecamatan kabupaten sukabumi. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan 2019 dapat disajikan dalam tabel T-C. 33 sebagaimana terlampir.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mewujudkan tercapainya visi misi kepala daerah dapat disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **3.1. SIMPULAN**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-programnya. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi/OPD dan antar instansi/OPD, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing instansi/OPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2019 yang disusun oleh pemerintah daerah, selain sebagai salah satu bahan untuk menyusun RAPBD juga merupakan acuan bagi setiap OPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergitas. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

- 1) Bagi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Renja Tahun 2019 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program pada Tahun 2019.
- 2) Masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta baik dalam perencanaan perancangan dan perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kegiatan dengan berpartisipasi aktif dalam usaha kesejahteraan sosial.
- 3) Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 selanjutnya menjadi bahan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksana dan Anggaran (DPA) dengan mengacu kepada kode program yang sudah ditetapkan.
- 4) Pada akhir Tahun Anggaran 2016, dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- 5) Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial maka dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui BAPPEDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain, Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi ini dibuat sebagai bahan pedoman pelaksanaan program kerja Tahun 2019 dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2018. Program kerja tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

### **3.2. SARAN**

Dengan adanya Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 ini diharapkan :

- a. Mampu melaksanakan pembangunan dengan efektif dan efisien transparan, akutanbel dan partisipatif serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta berbagai serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dalam program-program yang akan dicapai.
- b. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
- c. Mengakomodasikan berbagai aspirasi perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat.
- d. Menyadari keterbatasan sumber keuangan daerah, maka upaya-upaya perbaikan tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan yang didukung oleh anggaran, tetapi lebih penting adalah meningkatkan efektifitas peran pemerintah daerah dan dapat menampung partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.


Dalam memecahkan kendala dan hambatan diatas, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan dan memberikan bantuan penunangan dalam rangka meningkatkan kemampuan, tenaga/sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terdapat pada potensi sumber kesejahteraan sosial guna meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial pada masyarakat.

Disamping itu Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi terus menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, maupun lembaga dan pihak swasta dalam rangka penanganan PMKS dan peningkatan peran serta PSKS di Kabupaten Sukabumi.

Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menetapkan pemecahan masalah pencapaian sasaran, program, dan kegiatan untuk Tahun 2019 melalui strategi, sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya masyarakat yang merupakan PMKS dan PSKS;
2. Melibatkan lembaga usaha melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Menggali anggaran dari APBD I dan APBN untuk meningkatkan capaian target indikator pembangunan daerah dalam urusan sosial.

Sukabumi, Juli 2018  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukabumi



**Drs. IWAN RIDWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580705 198103 1 018



**Tabel T-C. 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019**  
**Jawa Barat Sukabumi**

Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cpaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2017)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2017)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Urusan Pelayanan Dasar Sosial									
	<b>Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan &amp; Kesetiakawanan Sosial (K2KS)</b>	<b>Jumlah Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemandiriannya dan Peserta yang Mendapatkan Penghargaan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial</b>								
	- Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah peserta rapat dalam kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	50	779	50	679	1.358	50	1.508	3.016
	- Pelayanan Penyuluhan Sosial	Jumlah Masyarakat yang Menerima Penyuluhan Sosial	300	250	300	600	200	300	1.150	383
	- Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah paket kadeudeuh bagi keluarga perintis dan pejuang kemerdekaan	116	166	116	156	134	116	438	378
	- Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah Kelompok Binaan Sosial (KBS) Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan	248	821	111	516	465	215	1.552	626
	- Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah Kelompok Binaan Sosial (KBS) PRSE yang mendapatkan bantuan	113	140	81	50	62	93	283	250
	-Pemberdayaan Warga Komunitas Adat	Jumlah Kelompok Binaan Sosial (KBS) Komunitas Adat yang mendapatkan bantuan	30	20	23	100	435	26	146	487

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cpaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2017)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2017)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	<b>Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah PMKS yang Pulih dan Berkembang Keberfungsian Sosialnya</b>								
	- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA	Jumlah anak yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan, dan metode penanganan anak nakal korban narkotika	33	565	30	12	40	30	607	1.839
	- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan penanganan	130	124	130	236	182	127	487	375
	- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan penanganan	38	45	40	161	403	35	241	634
	- Pelayanan Rehabilitasi Sosial WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Pendampingan terhadap kasus trafficking, tindak kekerasan dan pemulangan WNI-Migran bermasalah	135	249	125	29	23	130	408	302
	- Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah	Jumlah anak jalanan dan remaja yang mendapatkan pembekalan pelatihan	30	20	69		-	30	50	167
	- Bimbingan Sosial Restorasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Penjangkauan dan pendampingan kasus ABH dan bantuan stimulan bagi keluarga esk-ABH	25		20	90	450	20	110	440
	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Jumlah Keluarga Miskin Terdaftar yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial</b>								
	- Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin	Rekomendasi dan rujukan penanganan keluhan program perlindungan dan jaminan sosial	456	455	456	63.301	13.882	456	64.212	14.082
	- Pembinaan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan dan bantuan stimulan sembako	200	150	233	725	311	200	1.075	538

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cpaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2017)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2017)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	- Penunangan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah kelompok penerima manfaat program keluarga harapan yang mendapatkan bimbingan dan pengarahan	36.489	26.628	33.592	58.216	173	35.000	119.844	328
	- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial	Updating data program perlindungan dan jaminan sosial	1.296.058	1.575.605	1.296.008	1.235.857	95	12.960.058	15.771.520	1.217
	- Penunangan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlanar, ODKB dan Anak Terlanar	Monitoring penyaluran bantuan ASPDB, ASLUT dan Permakanan Anak Terlanar dalam panti	350	122	-	122	#DIV/0!	232	476	136
	- Penanganan Korban Bencana	Jumlah penanganan korban bencana alam dan sosial	1.500	5.213	1.500	950	63	1.500	7.663	511
	<b>Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah PSKS yang Diberdayakan</b>								
	- Pelayanan Pemberian Izin/Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) / Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Jumlah rekomendasi pengumpulan uang dan barang/ undian gratis berhasiah.	5		5	1	20	5	6	120
	- Pembentukan SATGAS Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi	Jumlah Masyarakat yang mengikuti bimbingan dan pelatihan tugas pungsi satgas kesetiakawanan sosial.	50		50	50	100	50	100	200
	- Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga PSKS yang mendapatkan bimbingan manajerial dalam penanggulangan kesejahteraan sosial.	1	10	4	47	1.175	4	61	6.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cpaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2017)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2017)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	- Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan sosial dan pengarahan bagi TKSK, PSM dan Karang taruna dalam program kesejahteraan sosial	379	385	364	127	35	374	886	234
	- Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Konseling, Penjangkauan dan assesmen kasus	1	1	1		-	1	2	200

Sukabumi, Juli 2018  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukabumi



Drs. IWAN RIDWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580705 198103 1 018

**Tabel T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial**  
**Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;	100%		334	384	441	507	825	676	441	507	
2	Bimbingan dan bantuan dalam Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;			416	416	416	416	756	1.216	416	416	
3	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP;	100%		220	242	266	293	499	467	266	293	
4	Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	100%		125	130	135	140	29	26	135	140	
5	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS			1.296.514	1.296.514	1.296.514	1.296.514	1.299.308	1.245.105	1.296.514	1.296.514	
6	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana Alam;	100%		35.325	36.932	38.539	40.146	60.811	998.359	38.539	40.146	
7	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TSKS dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			414	424	429	434	477	652	429	434	
8	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			10	10	10	10	48	25	10	10	

Sukabumi, Juli 2018  
 Kepala Dinas Sosial  
 Kabupaten Sukabumi



**Drs. IWAN RIDWAN**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580705 198103 1 018

Tabel T-C. 31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019  
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi

Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Urusan Pelayanan Dasar Sosial</b>											
<b>I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>745.800.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>745.800.000</b>
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	667.800.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	667.800.000	Sangat Penting
2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	78.000.000	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	78.000.000	Sangat Penting
<b>II Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					<b>70.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					<b>70.000.000</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	[Kantor OPD]	Persentase Disiplin Aparatur	100%	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	[Kantor OPD]	Persentase Disiplin Aparatur	100%	35.000.000	Sangat Penting
2	Pengadnan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	[Kantor OPD]	Persentase Disiplin Aparatur	100%	35.000.000	Pengadnan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	[Kantor OPD]	Persentase Disiplin Aparatur	100%	35.000.000	Sangat Penting
<b>III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>					<b>370.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>					<b>370.000.000</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	60.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	60.000.000	Sangat Penting
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	65.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	65.000.000	Sangat Penting
3	Penyusunan Laporan Keuangan	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	25.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	25.000.000	Sangat Penting
4	Monitoring dan evaluasi kegiatan	[Tersebar]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	80.000.000	Monitoring dan evaluasi kegiatan	[Tersebar]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	80.000.000	Sangat Penting
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	110.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	110.000.000	Sangat Penting
6	Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	30.000.000	Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	[Kantor OPD]	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	30.000.000	Sangat Penting
<b>IV Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>					<b>1.807.700.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>					<b>1.807.700.000</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	60.000.000	Sangat Penting
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	52.700.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	52.700.000	Sangat Penting
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	400.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	400.000.000	Sangat Penting

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	25.000.000	Sangat Penting
5	Penataan dan Pengamanan Arsip	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20.000.000	Penataan dan Pengamanan Arsip	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20.000.000	Sangat Penting
6	Pengadaan Perangkat Komputer	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.146.000.000	Pengadaan Perangkat Komputer	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.146.000.000	Sangat Penting
7	Pengadaan Mebeulair	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20.000.000	Pengadaan Mebeulair	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20.000.000	Sangat Penting
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	9.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	9.000.000	Sangat Penting
9	Pelayanan Administrasi Aset	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	75.000.000	Pelayanan Administrasi Aset	[Kantor OPD]	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	75.000.000	Sangat Penting
V	<b>Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Komunitas Adat Dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan Kepahlawanan &amp; Kesetiakawanan Sosial (K2KS).</b>				<b>7.087.150.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>				<b>7.087.150.000</b>	
1	Pemberdayaan Fakir Miskin;	[CIREUNGHAS]	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	248 org	3.236.150.000	Pemberdayaan Fakir Miskin;	[CIREUNGHAS]	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	248 org	3.236.150.000	Sangat Penting
2	Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);	[-- Silahkan Pilih --]	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	113 org	1.466.000.000	Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);	[-- Silahkan Pilih --]	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	113 org	1.466.000.000	Sangat Penting
3	Pemberdayaan Warga Komunitas Adat;	[SUKARAME]	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	30 org	615.000.000	Pemberdayaan Warga Komunitas Adat;	[SUKARAME]	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	30 org	615.000.000	Sangat Penting
4	Pelayanan Penyuluhan Sosial;	[-- Silahkan Pilih --]	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	300 org	300.000.000	Pelayanan Penyuluhan Sosial;	[-- Silahkan Pilih --]	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	300 org	300.000.000	Sangat Penting
5	Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	[SUKAMANAH]	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	116 org	1.100.000.000	Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	[SUKAMANAH]	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	116 org	1.100.000.000	Sangat Penting
6	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial	[Tersebar]	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	30 kk	370.000.000	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial	[Tersebar]	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	30 kk	370.000.000	Sangat Penting
VI	<b>Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>				<b>6.306.000.000</b>	<b>Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>				<b>6.306.000.000</b>	
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;	[Tersebar]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	130 org	1.294.000.000	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;	[Tersebar]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	130 org	1.294.000.000	Sangat Penting

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Bimbingan Sosial Restorasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;	[Tersebar]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	25 org	904.000.000	Bimbingan Sosial Restorasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;	[Tersebar]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	25 org	904.000.000	Sangat Penting
3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial;	[PASIRSUREN]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	38 org	702.500.000	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial;	[PASIRSUREN]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	38 org	702.500.000	Sangat Penting
4	Pelayanan Rehabilitasi Sosial WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;	[Tersebar]	Penanganan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	135 org	775.500.000	Pelayanan Rehabilitasi Sosial WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;	[Tersebar]	Penanganan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	135 org	775.500.000	Sangat Penting
5	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA;	[SUKAMANAHA]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	33 org	727.500.000	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA;	[SUKAMANAHA]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	33 org	727.500.000	Sangat Penting
6	Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah;	[Tersebar]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	30 org	1.375.000.000	Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah;	[Tersebar]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	30 org	1.375.000.000	Sangat Penting
7	Bimbingan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP);	[SUKAMANAHA]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	10 org	527.500.000	Bimbingan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP);	[SUKAMANAHA]	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	10 org	527.500.000	Sangat Penting
<b>VII</b>	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>				<b>16.640.097.500</b>	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>				<b>16.640.097.500</b>	
1	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial;	[SUKAMANAHA]	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	1.296.058 data	7.139.820.000	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial;	[SUKAMANAHA]	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	1.296.058 data	7.139.820.000	Sangat Penting
2	Penunangan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	[Tersebar]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	163.547 KPM	1.275.600.000	Penunangan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	[Tersebar]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	163.547 KPM	1.275.600.000	Sangat Penting



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH);	[Tersebar]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	36.489 KPM	1.579.790.000	Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH);	[Tersebar]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	36.489 KPM	1.579.790.000	Sangat Penting
4	Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin;	[Tersebar]	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	456 REKOM	5.176.887.500	Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin;	[Tersebar]	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	456 REKOM	5.176.887.500	Sangat Penting
5	Penanganan Korban Bencana;	[Tersebar]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	1.500 JIWA	450.000.000	Penanganan Korban Bencana;	[Tersebar]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	1.500 JIWA	450.000.000	Sangat Penting
6	Pembinaan bagi Lanjut Usia Terlantar	[Tersebar]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	200 org	800.000.000	Pembinaan bagi Lanjut Usia Terlantar	[Tersebar]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	200 org	800.000.000	Sangat Penting
7	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	[Tersebar]	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	1.400 data	150.000.000	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	[Tersebar]	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	1.400 data	150.000.000	Sangat Penting
8	Penunjang Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, ODKB dan Anak Terlantar;	[SUKAMANA]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	350 org	68.000.000	Penunjang Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, ODKB dan Anak Terlantar;	[SUKAMANA]	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	350 org	68.000.000	Sangat Penting
<b>VIII</b>	<b>Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>				<b>6.172.700.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>				<b>6.172.700.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	147 org	640.250.000	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	147 org	640.250.000	Sangat Penting
2	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	[Tersebar]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10 lbg	1.682.250.000	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	[Tersebar]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10 lbg	1.682.250.000	Sangat Penting
3	Pemberdayaan Pendamping PKH Kabupaten Sukabumi	[Tersebar]	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	470 org	2.362.900.000	Pemberdayaan Pendamping PKH Kabupaten Sukabumi	[Tersebar]	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	470 org	2.362.900.000	Sangat Penting
4	Pembinaan Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi;	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	52 org	643.000.000	Pembinaan Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi;	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	52 org	643.000.000	Sangat Penting
5	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);	[Tersebar]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 lbg	293.000.000	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);	[Tersebar]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 lbg	293.000.000	Sangat Penting

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi;	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50 org	75.000.000	Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi;	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50 org	75.000.000	Sangat Penting
7	Pelayanan Pemberian Izin/Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) / Undian Gratis Berhadiah (UGB)	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5 lbg	69.300.000	Pelayanan Pemberian Izin/Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) / Undian Gratis Berhadiah (UGB)	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5 lbg	69.300.000	Sangat Penting
8	Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	[SUKARAJA]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3 WKSBM	200.000.000	Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	[SUKARAJA]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3 WKSBM	200.000.000	Sangat Penting
9	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 lbg	207.000.000	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	[SUKAMANAH]	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 lbg	207.000.000	Sangat Penting

Sukabumi, Juli 2018  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukabumi



Drs. IWAN RIDWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580705 198103 1 018

**Tabel T-C 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019**  
**Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pemberdayaan Fakir Miskin	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya keterampilan dan kualitas hidup kelompok binaan sosial	Rp 3.105.000.000,00	
2	Pemberdayaan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya keterampilan dan kualitas hidup kelompok binaan sosial	Rp 625.000.000,00	
3	Pemberdayaan Warga Komunitas Adat	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya keterampilan dan kualitas hidup kelompok binaan sosial	Rp 950.000.000,00	
4	Rahabilitasi sosial penyandang disabilitas	Yayasan darul alam - kec. Caringin; Yayasan Aura Terindah - Palabuhanratu; Yayasan Ar-Rosadiah - Cicurug; Yayasan Alkaromah - Warungkiara	Meningkatnya keterampilan dan kualitas hidup kelompok binaan sosial	Rp 2.552.500.000,00	
5	Bimbingan Sosial Restorasi Anak Berhadapan dengan Hukum	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi	Rp 300.000.000,00	
6	Penanganan anak jalanan dan remaja putus sekolah	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya keterampilan dan kualitas hidup kelompok binaan sosial	Rp 500.000.000,00	
7	Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya keterampilan dan kualitas hidup kelompok binaan sosial	Rp 250.000.000,00	
8	Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi BWBLP	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya keterampilan dan kualitas hidup kelompok binaan sosial	Rp 50.000.000,00	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
9	Pelayanan dan rehabilitasi sosial wni-migran, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya perlindungan dan penanganan migran bermasalah dan korban tindak kekerasan	Rp 656.500.000,00	
10	Pembinaan lanjut usia terlantar	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya jaminan bagi lanjut usia terlantar	Rp 875.000.000,00	
11	Penunjangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya kinerja pendamping	Rp 318.500.000,00	
12	Penanganan Bencana	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Rp 87.500.000,00	
13	Verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya kualitas kinerja operator SIKS NG	Rp 193.000.000,00	
14	Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya kualitas pelayanan TKSK	Rp 147.000.000,00	
<b>Total</b>				<b>Rp 10.610.000.000,00</b>	

Sukabumi, Juli 2018,  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukabumi



**Drs. IWAN RIDWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580705 198103 1 018

**Tabel T-C 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2019**  
**Provinsi Jawa Barat kabupaten Sukabumi**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>745.800.000</b>				<b>932.250.000</b>
2.09.23.8.33	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	[Kantor OPD]	100%	667.800.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	834.750.000
2.09.23.8.48	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	[Kantor OPD]	100%	78.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	97.500.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>70.000.000</b>				<b>87.500.000</b>
2.09.23.18.40	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase Disiplin Aparatur	[Kantor OPD]	100%	35.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	43.750.000
2.09.23.18.41	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase Disiplin Aparatur	[Kantor OPD]	100%	35.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	43.750.000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>				<b>370.000.000</b>				<b>462.500.000</b>
2.09.23.22.42	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]	100%	60.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	75.000.000
2.09.23.22.43	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]	100%	65.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	81.250.000
2.09.23.22.44	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]	100%	25.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	31.250.000
2.09.23.22.47	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Tersebar]	100%	80.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	100.000.000
2.09.23.22.50	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]	100%	110.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	137.500.000
2.09.23.22.52	Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]	100%	30.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	37.500.000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1.807.700.000</b>				<b>2.259.625.000</b>
2.09.23.23.32	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]	100%	60.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	75.000.000
2.09.23.23.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]	100%	52.700.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	65.875.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.23.23.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]	100%	400.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	500.000.000
2.09.23.23.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]	100%	25.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	31.250.000
2.09.23.23.37	Penataan dan Pengamanan Arsip	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]	100%	20.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	25.000.000
2.09.23.23.38	Pengadaan Perangkat Komputer	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]	100%	1.146.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	1.432.500.000
2.09.23.23.39	Pengadaan Mebeulair	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]	100%	20.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	25.000.000
2.09.23.23.49	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]	100%	9.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	11.250.000
	Pelayanan Administrasi Aset	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]	100%	75.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	100%	93.750.000
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Komunitas Adat Dan Pelestarian Nilai-nilai Keperint</b>				<b>7.087.150.000</b>				<b>8.858.937.500</b>
2.09.23.86.1	Pemberdayaan Fakir Miskin;	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	[CIREUNGHAS]	248 org	3.236.150.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	248 org	4.045.187.500
2.09.23.86.2	Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	[-- Silahkan Pilih --]	113 org	1.466.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	113 org	1.832.500.000
2.09.23.86.3	Pemberdayaan Warga Komunitas Adat;	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	[SUKARAME]	30 org	615.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	30 org	768.750.000
2.09.23.86.45	Pelayanan Penyuluhan Sosial;	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	[-- Silahkan Pilih --]	300 org	300.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	300 org	375.000.000
2.09.23.86.46	Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	[SUKAMANA]	116 org	1.100.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	116 org	1.375.000.000
2.09.23.86.53	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	[Tersebar]	30 kk	370.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	30 kk	462.500.000
<b>6</b>	<b>Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>				<b>6.306.000.000</b>				<b>7.882.500.000</b>
2.09.23.92.8	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[Tersebar]	130 org	1.294.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	130 org	1.617.500.000
2.09.23.92.4	Bimbingan Sosial Restorasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[Tersebar]	25 org	904.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	25 org	1.130.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.23.92.9	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial;	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[PASIRSUREN]	38 org	702.500.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	38 org	878.125.000
2.09.23.92.12	Pelayanan Rehabilitasi Sosial WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;	Penanganan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	[Tersebar]	135 org	775.500.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	135 org	969.375.000
2.09.23.92.5	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA;	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[SUKAMANA]	33 org	727.500.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	33 org	909.375.000
2.09.23.92.11	Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah;	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[Tersebar]	30 org	1.375.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	30 org	1.718.750.000
2.09.23.92.10	Bimbingan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[SUKAMANA]	10 org	527.500.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	10 org	659.375.000
<b>7</b>	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>				<b>16.640.097.500</b>				<b>20.800.121.875</b>
2.09.23.91.21	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial;	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[SUKAMANA]	1.296.058 data	7.139.820.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	1.296.058 data	8.924.775.000
2.09.23.46.56	Penunjang Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[Tersebar]	163.547 KPM	1.275.600.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	163.547 KPM	1.594.500.000
2.09.23.91.23	Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH);	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[Tersebar]	36.489 KPM	1.579.790.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	36.489 KPM	1.974.737.500
2.09.23.91.20	Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin;	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[Tersebar]	456 REKOM	5.176.887.500	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	456 REKOM	6.471.109.375
2.09.23.91.25	Penanganan Korban Bencana;	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[Tersebar]	1.500 Jiwa	450.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	1.500 Jiwa	562.500.000
2.09.23.91.22	Pembinaan bagi Lanjut Usia Terlantar	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[Tersebar]	200 org	800.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	200 org	1.000.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.23.91.18	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[Tersebar]	1.400 data	150.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	1.400 data	187.500.000
2.09.23.91.24	Penunjangan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, ODKB dan Anak Terlantar;	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[SUKAMANA]	350 org	68.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	350 org	85.000.000
<b>8</b>	<b>Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>				<b>6.172.700.000</b>				<b>7.715.875.000</b>
2.09.23.87.26	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANA]	147 org	640.250.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	147 org	800.312.500
2.09.23.87.29	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSMB dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[Tersebar]	10 lbg	1.682.250.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	10 lbg	2.102.812.500
2.09.23.87.54	Pemberdayaan Pendamping PKH Kabupaten Sukabumi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[Tersebar]	470 org	2.362.900.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	470 org	2.953.625.000
2.09.23.87.28	Pembinaan Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi;	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANA]	52 org	643.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	52 org	803.750.000
2.09.23.87.30	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSMB dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[Tersebar]	1 lbg	293.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	1 lbg	366.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.23.87.27	Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi;	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANAH]	50 org	75.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	50 org	93.750.000
2.09.23.87.55	Pelayanan Pemberian Izin/Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) / Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANAH]	5 lbg	69.300.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	5 lbg	86.625.000
2.09.23.87.51	Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKARAJA]	3 WKSBM	200.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	3 WKSBM	250.000.000
2.09.23.87.31	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANAH]	1 lbg	207.000.000	APBD II	Sangat Penting Untuk dilaksanakan	1 lbg	258.750.000
				<b>Total</b>	<b>39.199.447.500</b>				<b>48.999.309.375</b>

Sukabumi, Juli 2018,  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukabumi



**Drs. IWAN RIDWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580705 198103 1 018

**DAFTAR RENCANA KERJA TAHUN 2019**  
**DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

Nomer	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2019									Usulan Pagu 2019						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			PIK P3K	PIK SEKTORAL	PAGU INDIKATIF	JUMLAH	APBD PROVINSI	APBN	TOTAL USULAN PAGU
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>DINAS SOSIAL</b>																					
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																<b>745.800.000</b>	<b>745.800.000</b>			<b>745.800.000</b>
2.09.23.8.33	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	[Kantor OPD]					Jumlah Pegawai yang dilayani 52 Orang;							667.800.000	667.800.000			667.800.000
2.09.23.8.48	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	[Kantor OPD]					Jumlah Pegawai yang dilayani 52 Orang;							78.000.000	78.000.000			78.000.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>			<b>70.000.000</b>
2.09.23.18.40	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tingkat Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	[Kantor OPD]					Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli 52 Stel;	Meningkatnya Disiplin Aparatur Berpakaian Dinas 100 %;						35.000.000	35.000.000			35.000.000
2.09.23.18.41	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tingkat Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	[Kantor OPD]					Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 52 Stel;	Meningkatnya Disiplin Aparatur Berpakaian Hari-hari tertentu 100 %;						35.000.000	35.000.000			35.000.000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>																<b>370.000.000</b>	<b>370.000.000</b>			<b>370.000.000</b>
2.09.23.22.42	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]					Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan 4 Dokumen;	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Tepat Waktu 100 %;						60.000.000	60.000.000			60.000.000
2.09.23.22.43	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]					Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja 7 Dokumen;							65.000.000	65.000.000			65.000.000
2.09.23.22.44	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 4 Dokumen;	Tersedianya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu 100 %;						25.000.000	25.000.000			25.000.000
2.09.23.22.47	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Tersebar]					Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi 30 Kegiatan;							80.000.000	80.000.000			80.000.000
2.09.23.22.50	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]					Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja 5 Dokumen;							110.000.000	110.000.000			110.000.000
2.09.23.22.52	Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Kantor OPD]					Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian 2 Dokumen;							30.000.000	30.000.000			30.000.000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>																<b>1.807.700.000</b>	<b>1.807.700.000</b>			<b>1.807.700.000</b>
2.09.23.23.32	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]					Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli 2 Unit;							60.000.000	60.000.000			60.000.000
2.09.23.23.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]					Gedung Kantor Yang Dipelihara 620 m2;	Terpeliharanya Gedung Kantor 620 m2;						52.700.000	52.700.000			52.700.000
2.09.23.23.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]					Kendaraan Dinas yang dipelihara 11 Unit; Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara 11 Unit;	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 22 Unit;						400.000.000	400.000.000			400.000.000
2.09.23.23.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]					Jumlah Komputer yang dipelihara 38 Unit;	Terpeliharanya Komputer 38 Unit;						25.000.000	25.000.000			25.000.000
2.09.23.23.37	Penataan dan Pengamanan Arsip	Penataan dan Pengamanan Arsip	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]					Jumlah Arsip yang ditata 10000 Buah;	Meningkatnya Penataan dan Keamanan Arsip 100 %;						20.000.000	20.000.000			20.000.000
2.09.23.23.38	Pengadaan Perangkat Komputer	Pengadaan Perangkat Komputer	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]					Pengadaan Laptop 52 Unit; Pengadaan Tablet 290 Unit;							1.146.000.000	1.146.000.000			1.146.000.000
2.09.23.23.39	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]					Jumlah Meubelair yang dibeli 10 Unit;	Meningkatnya Kinerja Aparatur 100 %;						20.000.000	20.000.000			20.000.000
2.09.23.23.49	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]					Jumlah AC yang dipelihara 15 Unit;							9.000.000	9.000.000			9.000.000
	Pelayanan Administrasi Aset	Pelayanan Administrasi Aset	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	[Kantor OPD]												75.000.000	75.000.000			75.000.000
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Komunitas Adat Dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan Kepahlawanan &amp; Kesetiakawanan Sosial (K2KS).</b>																<b>7.087.150.000</b>	<b>7.087.150.000</b>			<b>7.087.150.000</b>

Nomer	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2019						Usulan Pagu 2019									
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			PIK P3K	PIK SEKTORAL	PAGU INDIKATIF	JUMLAH	APBD PROVINSI	APBN	TOTAL USULAN PAGU
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.09.23.86.1	Pemberdayaan Fakir Miskin;	Bimbingan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin, Bimbingan Lanjutan Anggota KUBE, Sasaran Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin PKH Graduasi.	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	[CIREUNGHAS]				Jumlah Masyarakat Miskin yang Diidentifikasi dan Verifikasi Calon KBS Fakir Miskin 300 Orang; Jumlah Masyarakat Miskin yang Mengikuti Bimbingan Sosial Bantuan Stimulan UEP KUBE bagi KBS Fakir Miskin 150 Orang; Jumlah Bantuan Stimulan UEP KUBE bagi KBS Fakir Miskin 150 Orang; Jumlah Masyarakat Miskin Perdesaan yang Mendapatkan Bimbingan Lanjutan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif 556 Orang; Jumlah Masyarakat Miskin Pesisir yang Mendapatkan Bimbingan Lanjutan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif 600 Orang; Jumlah Masyarakat Miskin yang Menjadi Kelompok Binaan Sosial Mendapatkan Pembinaan KUBE Fakir Miskin Perdesaan 695 Orang; Jumlah Pendamping KUBE FM Perdesaan yang Mendapatkan Bimbingan	Meningkatnya kesejahteraan kelompok binaan sosial (KBS) fakir miskin 2301 Orang;							3.236.150.000	3.236.150.000			3.236.150.000
2.09.23.86.2	Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);	Bimbingan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PRSE, Bimbingan Lanjutan Anggota KUBE.	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	-- Silahkan Pilih --]				Jumlah Masyarakat kelompok Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang diidentifikasi sebagai calon penerima bantuan UEP KUBE lokasi P2WKSS & 10 Program PKK 430 Orang; Jumlah Masyarakat yang di Lakukan Verifikasi sebagai Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif KUBE di lokasi P2WKSS & 10 Program PKK 400 Orang; Jumlah Masyarakat Kelompok Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 400 Orang; Jumlah	Meningkatnya kesejahteraan kelompok binaan sosial (KBS) PRSE 500 Orang;						1.466.000.000	1.466.000.000			1.466.000.000	
2.09.23.86.3	Pemberdayaan Warga Komunitas Adat;	Bimbingan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Komunitas Adat, Bimbingan Lanjutan Anggota KUBE.	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	[SUKARAME]				Jumlah Masyarakat Komunitas Adat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif 100 Orang; Jumlah Masyarakat Komunitas Adat yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif KUBE	Meningkatnya kesejahteraan kelompok binaan sosial (KBS) Komunitas Adat 900 Orang;						615.000.000	615.000.000			615.000.000	
2.09.23.86.45	Pelayanan Penyuluhan Sosial;	Penyuluhan sosial masyarakat untuk menyebarkan informasi program dan kegiatan kesejahteraan sosial di kabupaten sukabumi.	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	-- Silahkan Pilih --]				Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial 700 Orang; Jumlah Masyarakat yang mengikuti Workshop Pembentukan Penyuluh Sosial Masyarakat 50 Orang; Jumlah Leaflet Program Kesejahteraan							300.000.000	300.000.000			300.000.000	
2.09.23.86.46	Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	Penghargaan bagi Janda PKRI, LVRI, PWRI, DHC'45 PEPABRI dalam rangka HUT RI dan Hari Pahlawan; Penghargaan bagi pemelihara makam Pahlawan;	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	[SUKAMANAH]				Jumlah Masyarakat Komunitas Adat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif 100 Orang; Jumlah Paket kadeudeuh dalam Rangka Hari Ulang Tahun RI 100 Orang; Jumlah Makam Bantamer yang Dipelihara 72 Orang; umlah Pegawai yang Meneikuti Kegiatan Perayaan							1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000	

Nomor	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2019									Usulan Pagu 2019						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			PIK P3K	PIK SEKTORAL	PAGU INDIKATIF	JUMLAH	APBD PROVINSI	APBN	TOTAL USULAN PAGU
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.09.23.86.53	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial	Menurunkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	[Tersebar]				Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Keluarga 100 Orang; Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif 100 Orang; Jumlah Masyarakat yang								370.000.000	370.000.000			370.000.000
<b>6</b>	<b>Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>																<b>6.306.000.000</b>	<b>6.306.000.000</b>			<b>6.306.000.000</b>
2.09.23.92.8	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;	Bimbingan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas, bantuan alat fisik penyandang disabilitas mencakup alat bantu dengar, tongkat ketiak, tongkat putih, kursi roda, pemasangan kaki dan tangan palsu.	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[Tersebar]				Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 50 Orang; Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 50 Orang; Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan							1.294.000.000	1.294.000.000			1.294.000.000	
2.09.23.92.4	Bimbingan Sosial Restorasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;	Bimbingan sosial bagi keluarga ABH, Parenting Skill Pola asuh Anak, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga ABH, Asesment Kasus ABH, Pemdampingan Korban.	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[Tersebar]				Jumlah Keluarga Eks-Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Bantuan Usaha Ekonomi Produktif 50 Orang; Jumlah Keluarga Eks -Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif 50 Orang; Jumlah							904.000.000	904.000.000			904.000.000	
2.09.23.92.9	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial;	Bimbingan sosial bagi WTS eks-rehabilitasi dalam panti, bagi gelandangan dan pengemis. Pengiriman WTS hasil razia dan diseminasi bahaya HIV/Aids.	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[PASIRSUREN]				Jumlah Tuna Sosial yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 50 Orang; Jumlah Tuna Sosial yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif 50 Orang; Jumlah WTS Hasil Razia yang Dikirim Ke Balai/Panti 50 Orang; Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan							702.500.000	702.500.000			702.500.000	
2.09.23.92.12	Pelayanan Rehabilitasi Sosial WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;	Pelayanan Korban Tindak Kekerasan, WNI-Migran bermasalah, pemulangan korban trafficking dan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP)	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Penanganan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	[Tersebar]				Jumlah Eks-Pekerja Migran Bermasalah/Human Trafficking yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 50 Orang; Jumlah Eks-Pekerja Migran Bermasalah/Human Trafficking yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 50 Orang; Jumlah Penanganan Pemulangan Korban Pekerja Migran Bermasalah dan Korban Tindak Kekerasan 235 Orang; Jumlah Penanganan Kasus							775.500.000	775.500.000			775.500.000	
2.09.23.92.5	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA;	Diseminasi bahaya Napza bagi Anak Remaja, bagi Masyarakat. Penanganan ANKN dengan pengiriman peserta latihan ke Balai/Panti. Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi ANKN.	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[SUKAMANAH]				Jumlah Anak Kelompok Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN) yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif 50 Orang; Jumlah Anak Kelompok Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN) yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif 50 Orang; Jumlah							727.500.000	727.500.000			727.500.000	

Nomer	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2019									Usulan Pagu 2019							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			PIK P3K	PIK SEKTORAL	PAGU INDIKATIF	JUMLAH	APBD PROVINSI	APBN	TOTAL USULAN PAGU	
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2.09.23.92.11	Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah;	Bimbingan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah, pengiriman peserta pelatihan ke Balai/Panti.	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[Tersebar]				Jumlah Anak Jalanan yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 50 Orang; Jumlah Anak Jalanan yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 48 Orang; Jumlah Anak Jalanan Hasil Razia yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan 30 Orang; Jumlah Anak Jalanan yang Dikirim Ke Balai Pemberdayaan Anak Jalanan 200 Orang; Jumlah Remaja Putus Sekolah (RPS) yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Jumlah Masyarakat Kategori Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang Mendapatkan Bimbingan Sosial 50 Orang; Jumlah Masyarakat Kategori Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif 50 Orang;							1.375.000.000	1.375.000.000			1.375.000.000		
2.09.23.92.10	Bimbingan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);	Bimbingan sosial Usaha ekonomi produktif (UEP) bagi kadeudeuh bagi narapidana yang mendapatkan remisi peringatan HUT RI	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[SUKAMANA]												527.500.000	527.500.000			527.500.000	
2.09.23.92.6	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;	Bimbingan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas, bantuan alat fisik penyandang disabilitas mencakup alat bantu dengar, tongkat ketiak, tongkat putih, kursi roda, pemasangan kaki dan tangan palsu.	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[CIMERANG]																	
2.09.23.92.7	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;	Bimbingan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas, bantuan alat fisik penyandang disabilitas mencakup alat bantu dengar, tongkat ketiak, tongkat putih, kursi roda, pemasangan kaki dan tangan palsu.	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP	[NEGLASARI]				Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 5 Orang;			Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kesetaraan penyandang disabilitas 5 Orang;										
<b>7</b>	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>																<b>16.640.097.500</b>	<b>16.640.097.500</b>			<b>16.640.097.500</b>	
2.09.23.91.21	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial;	Verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan dan jaminan sosial, dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran.	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[SUKAMANA]				Jumlah Pengelola Data Kemiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Honorarium 5256 Orang; Jumlah Blanko yang Dicitak dalam Banka Verifikasi			Akurasi data program perlindungan dan jaminan sosial 1296514 Data;					7.139.820.000	7.139.820.000			7.139.820.000	
2.09.23.46.56	Penunangan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	Penunangan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[Tersebar]				Jumlah Tim Koordinasi yang Mengikuti Rapat Bulanan 80 Orang; Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai 4700 Orang; Jumlah Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai yang Mendapatkan Honorarium 576 Orang; Jumlah Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai yang Mengikuti Rapat								1.275.600.000	1.275.600.000			1.275.600.000	

Nomer	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2019									Usulan Pagu 2019						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			PIK P3K	PIK SEKTORAL	PAGU INDIKATIF	JUMLAH	APBD PROVINSI	APBN	TOTAL USULAN PAGU
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.09.23.91.23	Penunangan Program Keluarga Harapan (PKH);	Pembinaan Kelompok Penerima Manfaat Program keluarga Harapan.	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[Tersebar]				Jumlah Tim Koordinasi PKH Kabupaten Sukabumi yang Mengikuti Rapat Bulanan 60 Orang; Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) 3700 Orang; Jumlah Kelompok Penerima Manfaat				Meningkatnya kesejahteraan kelompok sasaran program PKH dan ketepatan sasaran penggunaan bantuan. 60000 Keluarga;				1.579.790.000	1.579.790.000			1.579.790.000
2.09.23.91.20	Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin;	Pelayanan rekomendasi dan rujukan keluhan program perlindungan dan jaminan sosial mencakup bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi.	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[Tersebar]				Jumlah Tim Koordinasi PKH yang Mendapatkan Honorarium 4632 Orang; Jumlah Supervisor Kecamatan SLRT yang Mendapatkan Honorarium 600 Orang; Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Pelayanan SLRT 772 Orang; Jumlah Supervisor Kecamatan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas 100 Orang; Jumlah Pengelola Data yang Mengikuti Workshop Review Update Data Kemiskinan 130 Orang; Jumlah Tim Koordinasi dan Pengelola SLRT Daerah yang Mengikuti Rapat Bulanan 115 Orang; Jumlah			Ketepatan dan akurasi data penerima program perlindungan dan jaminan sosial 12000 Rekomendasi;				5.176.887.500	5.176.887.500			5.176.887.500	
2.09.23.91.25	Penanganan Korban Bencana;	Penyediaan Bufferstock kedaruratan bencana alam skala Kabupaten, penanganan konflik bencana sosial.	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[Tersebar]				Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Penanganan 3000 Orang;				Tertanganinya korban bencana alam dan sosial 3000 Jiwa;				450.000.000	450.000.000			450.000.000
2.09.23.91.22	Pembinaan bagi Lanjut Usia Terlantar	Bimbingan sosial bagi Lanjut usia terlantar dalam masyarakat.	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[Tersebar]				Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan Sosial 1500 Orang; Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Dikirim ke Balai/Panti 50 Orang;				Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan lanjut usia 1500 Orang;				800.000.000	800.000.000			800.000.000
2.09.23.91.18	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Rapat koordinasi penentuan CPCL penerima Program RS-RTLH, monitoring dan evaluasi program RS-RTLH	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[Tersebar]				Jumlah data yang diverifikasi untuk program RS-RTLH 2702 Data; Jumlah Anggota Tim yang Mendapatkan Sosialisasi Program RS-RTLH 188 Orang; Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek Pasca Pencairan Progran RS-RTLH 94				Ketepatan sasara program RS-RTLH 2702 Data;				150.000.000	150.000.000			150.000.000
2.09.23.91.24	Penunangan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, ODKB dan Anak Terlantar;	Penunangan program Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), dan Bantuan bagi Anak Terlantar dalam Panti.	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	[SUKAMANAH]				Jumlah Pendamping ASLU yang Mendapatkan Honorarium 10 Orang; Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam LKSA 60 Orang;				Meningkatnya kualitas sumberdaya sasaran program ASPDB, ASLUT dan Anak terlantar dalam panti 122 Orang;				68.000.000	68.000.000			68.000.000
2.09.23.91.13	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Rapat koordinasi penentuan CPCL penerima Program RS-RTLH, monitoring dan evaluasi program RS-RTLH	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[NAGRAKSARI]				Jumlah data yang diverifikasi untuk program RS-RTLH 25 Data;				Ketepatan sasara program RS-RTLH 25 Data;				-	-			-
2.09.23.91.14	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Rapat koordinasi penentuan CPCL penerima Program RS-RTLH, monitoring dan evaluasi program RS-RTLH	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[SUKAMUKTI]				Jumlah data yang diverifikasi untuk program RS-RTLH 50 Data;								-	-			-

Nomer	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2019									Usulan Pagu 2019						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			PIK P3K	PIK SEKTORAL	PAGU INDIKATIF	JUMLAH	APBD PROVINSI	APBN	TOTAL USULAN PAGU
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.09.23.91.15	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Rapat koordinasi penentuan CPCL penerima Program RS-RTLH, monitoring dan evaluasi program RS-RTLH	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[BABAKAN PANJANG]				Jumlah data yang diverifikasi untuk program RS-RTLH 1 Data;			Ketepatan sasara program RS-RTLH 0 Data;					-	-			
2.09.23.91.16	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Rapat koordinasi penentuan CPCL penerima Program RS-RTLH, monitoring dan evaluasi program RS-RTLH	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[CARINGIN]				Jumlah data yang diverifikasi untuk program RS-RTLH 100 Data;			Ketepatan sasara program RS-RTLH 0 Data;					-	-			
2.09.23.91.17	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Rapat koordinasi penentuan CPCL penerima Program RS-RTLH, monitoring dan evaluasi program RS-RTLH	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[MEKARJAYA]				Jumlah data yang diverifikasi untuk program RS-RTLH 27 Data;			Ketepatan sasara program RS-RTLH 0 Data;					-	-			
2.09.23.91.19	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Rapat koordinasi penentuan CPCL penerima Program RS-RTLH, monitoring dan evaluasi program RS-RTLH	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS	[BABAKAN PANJANG]				Jumlah data yang diverifikasi untuk program RS-RTLH 1 Data;			Ketepatan sasara program RS-RTLH 0 Data;					-	-			
<b>8</b>	<b>Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>																<b>6.172.700.000</b>	<b>6.172.700.000</b>			<b>6.172.700.000</b>
2.09.23.87.26	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	Pembinaan terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Penyuluh Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANA]				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Mendapatkan Pembinaan Kapasitas 235 Orang; Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Mendapatkan Honorarium 564 Orang; Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Melalui Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 125 Orang; Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Bantuan			Meningkatnya kualitas TKSK, PSM dan Karang Taruna dalam penanggulangan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing. 332 Orang;					640.250.000	640.250.000			640.250.000



Nomer	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2019									Usulan Pagu 2019							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			PIK P3K	PIK SEKTORAL	PAGU INDIKATIF	JUMLAH	APBD PROVINSI	APBN	TOTAL USULAN PAGU	
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2.09.23.87.29	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	Pemberdayaan terhadap organisasi sosial, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[Tersebar]				Jumlah Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial 50 Orang; Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomis Peningkatan Kesejahteraan Sosial 25 Lembaga; Jumlah Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Melalui Bakti Sosial Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) 25 Lembaga; Jumlah Anak Yatim atau Tidak Mampu yang Mengikuti Khitanan Masal 200 Orang; Jumlah Pasangan Tidak Mampu yang Mengikuti Nikahan Masal 100 Pasang; Jumlah Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang Mengikuti Rapat Program Kerja 25 Orang; - Jumlah Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang Mengikuti Rapat Program Kerja 25 Orang; Jumlah Masyarakat Umum yang Mendapatkan Diseminasi Peran	Meningkatnya kerjasama dan tata kelola kelembagaan dalam penanggulangan kesejahteraan sosial 27 Lembaga;								1.682.250.000	1.682.250.000			1.682.250.000
2.09.23.87.54	Pemberdayaan Pendamping PKH Kabupaten Sukabumi	Pemberdayaan Pendamping PKH Kabupaten Sukabumi	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TSKS dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[Tersebar]				Jumlah Pendamping dan Operator PKH yang Mendapatkan Honorarium 4200 Orang; Jumlah Pengurus Sekretariat PKH yang Mendapatkan Honorarium 24 Orang; Jumlah Pendamping dan Operator yang Mengikuti Rapat Bulanan 1400 Orang; Jumlah Pendamping PKH yang Mendapatkan Bantuan Sarana								2.362.900.000	2.362.900.000			2.362.900.000	
2.09.23.87.28	Pembinaan Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi;	Pembinaan Anggota Tagana	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TSKS dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANAH]				Jumlah Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi yang Mengikuti Pelatihan Pemantapan Tagana 60 Orang; Jumlah Anggota Tagana yang Mengikuti Rapat Evaluasi Bulanan 300 Orang; Jumlah Anggota Tagana yang Dikirim Menjadi Peserta Jambore TAGANA Tingkat Nasional 20 Orang; Jumlah Anggota Tagana yang Dikirim Menjadi Peserta Pelatihan Anggota Tagana Tingkat Provinsi 20 Orang; Jumlah Masyarakat dalam Lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB) yang Mendapatkan Pembinaan Lanjutan 200 Orang; Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Saresehan Penguatan Akses Kearifan Lokal dan Keserasian Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Quick respon terhadap kebencanaan lingkungan. 60 Orang;								643.000.000	643.000.000			643.000.000
2.09.23.87.30	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);	Pemberdayaan kegiatan penjangkauan LK3 terhadap kasus-kasus sosial yang ada, penyediaan konseling bagi masyarakat dan umum.	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[Tersebar]				Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penangan Kasus Psykososial 100 Orang; Jumlah Tim yang Melakukan Pembahasan Kasus 120 Orang; Jumlah Kasus yang Dilakukan Penanganan Melalui	Tertanganinya kasus-kasus sosial yang terjadi 100 Orang;								293.000.000	293.000.000			293.000.000

Nomer	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2019									Usulan Pagu 2019						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			PIK P3K	PIK SEKTORAL	PAGU INDIKATIF	JUMLAH	APBD PROVINSI	APBN	TOTAL USULAN PAGU
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.09.23.87.27	Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi;	Pembentukan satgas kesetiakawanan sosial untuk Quick respon permasalahan sosial tingkat desa.	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANAH]				Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembentukan Satgas Kesos 50 Orang;			Meningkatnya penanganan masalah sosial tingkat desa 50 Orang;					75.000.000	75.000.000			75.000.000
2.09.23.87.55	Pelayanan Pemberian Izin/Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) / Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Pelayanan Pemberian Izin/Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) / Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSMB dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANAH]				Jumlah Tim Perumus yang Mengikuti Peretemuan Rutin Pembahasan Rekomendasi 84 Orang; Jumlah Masyarakat dan Perusahaan yang Mengikuti Diseminasi Pelayanan								69.300.000	69.300.000			69.300.000
2.09.23.87.51	Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB)	Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB)	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSMB dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKARAJA]				Jumlah Masyarakat dalam Kelompok Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB) yang Mendapatkan Bimbingan Motivasi 80 Orang;								200.000.000	200.000.000			200.000.000
2.09.23.87.31	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	Rapat koordinasi pembentukan tim peringatan hari lanjut usia	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSMB dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	[SUKAMANAH]				Jumlah Peringkat Daerah dan Masyarakat Umum yang Mengikuti Peringatan Hari Lanjut Usia 500 Orang; Jumlah Ti m yang Mengikuti Rapat Persiapan Peringatan Hari Lanjut			Meningkatnya penanganan lanjut usia 2 Lembaga;					207.000.000	207.000.000			207.000.000
<b>TOTAL</b>																	<b>39.199.447.500</b>	<b>39.199.447.500</b>			<b>39.199.447.500</b>

Sukabumi, Juli 2018  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukabumi

**DR. IWAN KIDWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195807051981031018